

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari tinjauan dan wawancara yang dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Pemukiman maka penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengawasan pelaksanaan penyediaan ruang terbuka hijau privat yang diatur melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 sudah sesuai dan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), pengendalian pelaksanaan tersebut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawab adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP). Pengawasan pelaksanaan penyediaan ruang terbuka hijau privat yaitu dikendalikan melalui izin bangunan gedung yaitu untuk memperoleh Persyaratan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), yang mana ruang terbuka hijau sebagai salah satu standar teknis yang harus dipenuhi guna memperoleh izin bangunan gedung. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terkait pengawasan pelaksanaan, Pemerintah Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

2. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman yaitu pada ketersediaan jumlah sumber daya manusia. Keterbatasan jumlah personil Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman jumlah personil yang dimiliki tidak sesuai dengan jumlah ideal yang seharusnya dimiliki, sehingga dalam melakukan pengawasan belum dapat terlaksana secara maksimal. Perlu diketahui selain melakukan pengawasan disisi lain fokus DPUPKP sendiri yaitu melakukan pelayanan publik dibidang perizinan bangunan gedung, sehingga pengawasan pelaksanaan menjadi terkendala.
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, DPUPKP mengajukan penambahan jumlah pegawai ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Yogyakarta akan tetapi sejauh ini BKPSDM belum dapat merealisasikan penambahan jumlah pegawai sesuai dengan apa yang dibutuhkan DPUPKP berdasarkan jumlah ideal dan kompetensi yang dibutuhkan. Upaya selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu mengoptimalkan jumlah personil yang ada dengan diberikan pekerjaan yang merangkap sesuai kemampuannya, selain itu cara lain yang dilakukan DPUPKP dengan melakukan koordinasi pada kecamatan-kecamatan untuk membantu pengawasan dengan cara memberikan laporan-laporan yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh DPUPKP.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, dalam hal ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam hal mengatasi kendala dalam pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 yang menjadi bagian dari standar teknis yang harus dipenuhi guna memperoleh izin bangunan gedung. Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi pentingnya standar teknis dalam izin bangunan gedung, dengan adanya kesadaran masyarakat tersebut maka masyarakat akan patuh terhadap peraturan dan berkurangnya pelanggaran yang dilakukan masyarakat sehingga dapat meringankan beban pengawasan DPUPKP karena masyarakat sudah memiliki kesadaran dan pengetahuan yang baik.
2. Penambahan jumlah tenaga kerja, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman untuk mengatasi kendala terkait jumlah personil dalam pengawasan, perlu dilakukannya perekrutan tenaga kerja pada bidang-bidang tertentu yang membutuhkan penambahan jumlah personil, sehingga pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 yang menjadi bagian dari standar teknis yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin bangunan menjadi maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah Syukur, 1987, Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan, Persadi, Ujung Pandang
- Adrian Sutedi, 2015, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta
- Bagir Manan, 1995, Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah, Universitas LPPM, Bandung
- Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram
- Nurmayanti, 2000, Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar), Universitas Lampung, Bandar Lampung
- Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2022, Pedoman Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Riawan Tjandra. W, 2023, Hukum Peradilan Tata Usaha Negara, Kanisus, Yogyakarta
- Ridwan .H.R, 2014, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Saiful Anwar, 2004, Sendi- Sendi Hukum Administrasi Negara, Glora Madani Press, Jakarta

Sujamto, 1990, Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggungjawab, Sinar Grafika, Jakarta

Sukarna, 2011, Dasar-Dasar Manajemen, Mandar maju, Bandung

B. Jurnal

Iin Arianti, 2010, “Ruang Terbuka Hijau”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Rekayasa*, VolV/No-01/Januari/2010, Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil POLNEP.

Khalid Prawiranegara, 2021, “Implementasi Asas-Asas Umum PemerintahanYang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol/No-06/Juli/2021, Universitas Islam Indonesia.

Muhammad Alfaruq Nirwana, 2022, “Pengaturan Terkait Alih Fungsi Ruang Terbuka Hijau Menjadi Lahan Pemukiman”, *Journal Legal Dialectics*, Vol. 1 No. 2 (2022), Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri.

Solechan, 2019, “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol 2, No 3 (2019), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725, Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234, Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat. Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 6. Sekretariat Daerah, Yogyakarta

Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Bangunan Gedung

D. Data Elektronik/Internet

Admin Dinas Pekerjaan Umum, “Ruang Terbuka Hijau”, <https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/105/ruang-terbuka-hijau>, diakses 20 September 2023

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Profil Kota Yogyakarta, <https://www.bpkp.go.id/diy/konten/824/Profil-Kota-Yogyakarta>, diakses 21 September 2023

Dr. Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H, Merasa Dirugikan Peraturan Walikota? Ajukan Ini, hlm.1, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/merasa->

dirugikan-peraturan-walikota-ajukan-ini-lt540b054b9af52/#_ftn1 , diakses 21 September 2023.

Hikma Dian Sari, Asas dan Fungsi Pemerintahan: Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) serta Fungsi Pemerintahan dalam Pelayanan Publik, hlm.3, <https://osf.io/pkdqw/>, diakses 21 September 2023.

Jumadi, Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia, hlm.38, <file:///D:/my%20documents/downloads/49-Article%20Text-171-1-10-20180426.pdf>, diakses 21 September 2023.

Laporan Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah DPUPKP Kota Yogyakarta, Desember 2022, https://pu.jogjakota.go.id/download/hit/11892/lkjip-ta.-2022-11892_.pdf, diakses 31 Oktober 2023

Renata Christina Nauli, Pengertian PBG dan Sanksi Jika Bangunan Tak Memilikinya, hlm.1 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-pbg-dan-sanksi-jika-bangunan-tak-memilikinya-lt50a86f56c173c/>, diakses 25 Oktober 2023

Y. Sri Pudyatmoko, "Materi Ke-2 Pengertian, Tujuan, Aspek Hukum Hukum Perizinan", diakses 30 Oktober 2023

Yuli Nurhanisah, Beda IMB dan PBG Saat Bangun Gedung, <https://indonesia.go.id/mediapublik/detail/54> , diakses 25 Oktober 2023

E. Lain-Lain

Moh. Nur Faiq., S.T, Jabatan Analisis Ahli Muda Kelompok Substansi
Pengendalian Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan
Pemukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta, Wawancara Pribadi di DPUPKP
Kota Yogyakarta pada Selasa, 24 Oktober 2023.

